



BULETIN

PARLEMENTARIA

NOMOR: 856/IV/2015

I/APRIL 2015



Komisi V DPR Tinjau Sejumlah Tanggul Di Jatibarang



Komisi V DPR Tinjau Sejumlah Tanggul Di Jatibarang



Tim Kunker Spesifik Komisi V DPR meninjau tanggul jebol di Jatibarang yang berdampak pada banjir Indramayu

Tim Kunjungan Spesifik Komisi V DPR yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi V DPR Yudi Widiana Adia di Jatibarang, Indramayu, Senin (23/3) melakukan peninjauan ke sejumlah tanggul besar sungai Cimanuk yang jebol 16 Maret lalu dan menyebabkan ribuan rumah, sekolah dan masjid kebanjiran.

Tanggul yang ditinjau diantaranya adalah Tanggul Cimanuk Blok Cileng-

kol, Tanggul Cimanuk Jatibarang baru Blok Lapangan dan Tanggul Cimanuk Blok Toko Alba.

Dihadapan wartawan, Ketua Tim Kunjungan spesifikasi Yudi Widiana Adia mengatakan bahwa Komisi V DPR meminta data tanggul yang telah dibangun dan tanggul-tanggul yang kritis.

“Kita melihat kejadian banjir 13 Ma-

ret lalu, akibat tanggul yang jebol itu, umumnya karena tanggul yang sudah terlalu tua, tidak ada pemeliharaan dan penguatan,” jelas Yudi yang juga politisi PKS ini.

Selain itu, ia juga menghimbau kepada Pemda agar dalam penataan ruang pemukiman untuk memperhatikan posisi tanggul-tanggul di sungai.

“Jangan sampai mengembangkan suatu wilayah yang menjadi ancaman,” tegasnya.

Yudi pun meminta kepada Pemerintah untuk mensosialisasikan potensi-potensi bencana di setiap daerah.

“Hal itu karena, kita melihat saat ini pemerintah daerah, sering kali mengembangkan wilayah-wilayah tanpa memperhatikan hal tersebut,” tegasnya.

Kunjungan spesifik kali ini diikuti pula oleh anggota Komisi V DPR lainnya, diantaranya Yoseph Umar Hadi (FPDIP), Moh. Nizar Zahro (F Gerindra), Anton Sukartono Suratno (FPD), Mohammad Toha (FPKB), Mahfudz Abdurrahman (FPKS), Nurhayati (F PPP), Syahrulan Pua Sawa (FPAN), Sahat Silaban (FNasdem) dan Miryam S Haryani (F Hanura).

(nt) foto: nita/parle/hr

Kerjasama Dengan Setjen Parlemen Korsel Percepat Kerja Lebih Praktis

Wakil Ketua DPR-RI Agus Hermanto didampingi Ketua Komisi XI Fadel Muhammad dan Wakil Ketua BKSAP Meutya Hafidz serta Sekjen DPR Winantuningtyastiti menerima Delegasi Sekjen DPR Korea Selatan Park Hyung-jun didampingi Dubes Taiyong Cho di ruang kerja Pimpinan Lantai III Gedung Nusantara III, Senayan, Kamis (26/3).

Menurut Agus Hermanto pertemuan ini spesial karena khusus membicarakan tentang kesekjenan DPR RI dan ke-

sekjenan DPR Korea Selatan. “Kita tahu bahwa Kesetjenan Korea Selatan lebih maju terutama IT-nya. Selain itu DPR Korea Selatan sudah biasa dalam melaksanakan telekonfrens, penyusunan anggaran, dan pelaksanaan kegiatan sehari-harinya,” ungkap politisi PD ini.

Di sisi lain, lanjut dia, terdapat manfaat penting diadakannya kerjasama ini yaitu bisa menimba ilmu dari Korea Selatan dan program-program yang ada di negara itu bisa

PENGAWAS UMUM: Pimpinan DPR-RI | **PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH:** Dr. Winantuningtyastiti, M. Si (Sekretaris Jenderal DPR-RI) | **WAKIL KETUA PENGARAH:** Achmad Djuned SH, M.Hum (Wakil Sekretaris Jenderal DPR-RI) ; Tatang Sutarsa, SH (Deputi Persidangan dan KSAP) | **PIMPINAN PELAKSANA:** Drs. Djaka Dwi Winarko, M. Si. (Karo Humas dan Pemberitaan) | **PIMPINAN REDAKSI:** Dadang Prayitna, S.IP. M.H. (Kabag Pemberitaan) | **WK. PIMPINAN REDAKSI:** Dra. Tri Hastuti (Kasubag Penerbitan), Mediantoro SE (Kasubag Pemberitaan) | **REDAKTUR:** Sugeng Irianto, S.Sos; M. Ibnur Khalid; Iwan Armanias; Mastur Prantono | **SEKRETARIS REDAKSI:** Suciati, S.Sos ; Ketut Sumerta, S. IP | **ANGGOTA REDAKSI:** Nita Juwita, S.Sos ; Supriyanto ; Agung Sulistiono, SH; Rahayu Setiowati ; Muhammad Husen ; Sofyan Effendi | **PENANGGUNGJAWAB FOTO:** Eka Hindra | **FOTOGRAFER:** Rizka Arinindya ; Naefuroji ; M. Andri Nurdriansyah | **SIRKULASI:** Abdul Kodir, SH | **ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA:** BAGIAN PEMBERITAAN DPR-RI, Lt.II Gedung Nusantara III DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348,5715586, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: dpr.pemberitaan@gmail.com; www.dpr.go.id/berita



Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Agus Hermanto didampingi Ketua Komisi XI Fadel Muhammad dan Wakil Ketua BKSAP Meutya Hafidz menerima kunjungan kehormatan Sekjen National Assembly Republik Korea

diterapkan Indonesia. Dengan demikian pekerjaan-pekerjaan lebih praktis, lebih cepat, dan bisa lebih dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, Ketua Komisi XI Fadel Muhammad menjelaskan ada manfaat lain dalam pertemuan tersebut yaitu ingin belajar mengenai sistem anggaran Korea Selatan.

“Korea itu memiliki sistem anggaran sangat bagus, sehingga pengontrolan sampai ke tingkat bawah itu berjalan sangat baik,” ia menjelaskan.

Untuk itu Komisi XI DPR akan membuat sistem yang sama, sebab saat ini masih belum terlalu bagus dengan model keuangan yang dilakukan. Komisi XI kini sedang menyusun Rancangan Undang-Undang Bank Indonesia, Undang-Undang Perbankan dan Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK).

“Ini sebagai arsitektur sistem Keuangan RI. Seperti di Korea Selatan pada 8 tahun yang lalu, mereka buat hal yang sama dan sekarang sudah berhasil. Mudah-mudahan kita bisa melakukan studi banding atau belajar dengan mereka,” ujar politisi PG ini.

Agus Hermanto menambahkan, kerjasama yang terjalin selama ini dengan Korea Selatan lebih sering dalam bidang perdagangan, teknologi bahkan *people to people, parlement to parlement*. “Saya saja rasanya puluhan kali menemui Delegasi Parlemen Korea Selatan, sehingga ke depan akan kita tingkatkan terus. Saat ini memang yang difokuskan kesekjen terlebih dahulu,” jelasnya. (mp,ds,ss)

foto: iwan armanias/parle/hr

DPR Minta Kick Off ISL Bisa Diikuti Semua Klub Sepakbola

Dewan Perwakilan Rakyat kembali gelar rapat dengan Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) dan PT Liga Indonesia untuk membahas kompetisi Indonesia Super League (ISL). DPR meminta kompetisi ISL dapat diikuti oleh semua klub sepakbola, dan tetap dimulai pada 4 April 2015 mendatang.

Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR Bidang Korkesra Fahri Hamzah, dengan didampingi oleh Ketua Komisi X Teuku Riefky Harsya dan perwakilan Kapoksi, diantaranya Anggota Komisi X Dadang Rusdiana (F-Hanura), Taufiqulhadi (F-Nasdem), dan Sutan Adil Hendra (F-Gerindra).

Sementara, dari pihak BOPI ada Ketua Umum BOPI Noor Aman, Sekretaris Jenderal BOPI Heru Nugroho, dan Ketua Tim Verifikasi Iman Suroso. Hadir pula CEO PT Liga Indonesia Joko Driyono, Anggota EXCO PSSI Jamal Azis, dan Anggota Tim Sinergis PSSI Togar Manahan Nero. Pertemuan berlangsung di ruang rapat Pimpinan DPR, Gedung Nusantara III, Rabu (26/03/15) sore.

Fahri berharap bahwa pertemuan yang sudah difasilitasi ini dapat menghasilkan kesepakatan dan *win-win*



Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah didampingi Pimpinan dan Anggota Komisi X audiensi dengan BOPI

solution untuk semua pihak. Apalagi, harapan masyarakat terhadap persepakbolaan Indonesia sedang bangkit, sehingga kesepakatan ini dapat menjawab pertanyaan dari publik. Ia juga berharap kick off ISL yang dijadwalkan pada 4 April 2015 bisa diikuti oleh seluruh klub.

“Saya ingin sepakbola tidak menjadi isu politik. Masyarakat berharap pada hiburan sepakbola. Kita harus ada komitmen untuk segera ada jadwal *kick off*. Kami mohon *kick off* tanggal 4 April bisa diikuti oleh semua klub

sepakbola,” harap Fahri.

Politisi F-PKS ini menambahkan, mengenai klub yang masih bermasalah keuangan atau status atlet dan pembina, segera ada ikrar komitmen untuk menyelesaikannya. Sehingga, jadwal segera dapat diumumkan kepada klub bola dan publik. Dalam kesempatan itu, Fahri juga mengapresiasi apa yang telah dikerjakan oleh BOPI.

“Ini ada kepentingan publik. BOPI juga sudah bekerja luar biasa. Kami berharap BOPI dapat melakukan verifikasi pada cabang olahraga lain, dimana



banyak olahraga mati. BOPI juga dapat mengawasi sesuai kewenangannya,” harap Politisi asal Dapil Nusa Tenggara Barat ini.

Sebelumnya, Noor Aman memaparkan verifikasi yang dilakukan oleh timnya kepada klub sepakbola peserta ISL. Noor mengaku proses pengumpulan data verifikasi terus berlanjut. Sampai sekarang, data sudah mencapai 90 persen, sembari tahap validasi data. Hambatan-hambatan yang ditemui BOPI dalam proses verifikasi yakni tidak lengkapnya data-data yang dikumpulkan klub ke PT Liga Indonesia.

Kemudian Noor mengumumkan

hasil verifikasi. Klub yang masuk dalam kategori A, yaitu klub yang memenuhi syarat, yakni Persipura Jayapura, Persija Jakarta, Persib Bandung, Semen Padang, dan Sriwijaya FC. Berikutnya, klub yang termasuk ke dalam kategori, meliputi Bali United, PSM Makassar, Persiba Balikpapan, Pusam Mania BC, Barito Putra, dan Persiram Raja Ampat.

Klub Persebaya Surabaya masuk dalam kategori C, dengan diberikan catatan keras, dengan ditemukannya SIUP yang bermasalah dan Akta yang harus keolahragaan. Dan yang terakhir, Kategori D, yakni klub yang

belum direkomendasikan, meliputi Arema Cronus, Pelita Bandung Raya, Persela Lamongan, Perseru Serui, Mitra Kukar, dan Gresik United.

Menanggapi hasil verifikasi BOPI tersebut, PT Liga mengklaim akan melakukan langkah terobosan untuk memanggil klub-klub agar permasalahan itu bisa segera diselesaikan.

Karena belum tercapai komitmen dalam pertemuan ini, bahasan akan kembali dilanjutkan pada Rapat Dengar Pendapat Umum, Kamis (26/03/15) pukul 16.00 WIB, dengan Komisi X DPR.

(sf) foto: iwan armanias/parle/hr

Ekonomi Global Koreksi Angka Pertumbuhan

Ketidakpastian ekonomi global selama ini telah mengoreksi target angka pertumbuhan nasional. Dalam APBN-Perubahan 2015 target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan 5,8 persen, terkoreksi menjadi 5,7 persen.

Demikian disampaikan Ketua DPR RI Setya Novanto dalam pidatonya membuka acara workshop seminar ekonomi dan sosial di DPR, Rabu (25/3). “Kita ketahui bersama perekonomian global saat ini masih menghadapi ketidakpastian. Diawali dari krisis Yunani yang belum selesai, perlambatan ekonomi Jepang dan Cina, pemulihan ekonomi Eropa yang masih lambat, serta penurunan harga minyak mentah dunia.”

Penurunan ini, lanjut Novanto, lebih disebabkan oleh kelebihan pasokan produksi minyak di Amerika, dari 5,1 juta barel per hari di tahun 2013 menjadi 7,4 juta barel per hari pada tahun 2015. OPEC sendiri sebagai organisasi minyak dunia, masih mempertahankan produksi 30 juta barel per hari di tengah perlambatan ekonomi dunia. Kondisi ini secara langsung maupun tidak, berdampak pula pada perekonomian nasional.

Indonesia sendiri sedang menghadapi penurunan harga minyak dunia yang menyebabkan *potential revenue loss* sekitar Rp202 triliun yang bersumber dari penerimaan migas. *Potential revenue loss* ini disebabkan juga akibat penurunan laju produksi migas nasional sebesar 8 persen. Untuk menutupi penurunan tersebut, penerimaan per-

pajakan ditingkatkan sebesar Rp109 triliun dalam APBN-Perubahan 2015. Dengan demikian, penurunan pendapatan negara hanya sebesar Rp32 triliun.

Diungkapkan Novanto, pada tahun-tahun mendatang Indonesia akan tetap dihadapkan pada ketidakpastian kondisi ekonomi global. Selain itu, banyak tantangan lainnya yang dihadapi, yaitu pusat ekonomi dunia akan bergeser dari kawasan Eropa-Amerika ke kawasan Asia Pasifik, tren perdagangan global tidak hanya dipengaruhi oleh perdagangan barang, semakin meningkatnya hambatan non tarif di negara tujuan ekspor, dan implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN.

“Kondisi ini harus mampu kita jawab melalui berbagai kebijakan yang tepat. Sedangkan di dalam negeri, kita juga masih dihadapkan dengan berbagai permasalahan yang menghambat akselerasi perekonomian nasional. Permasalahan tersebut antara lain terbatasnya ketersediaan infrastruktur yang mendukung peningkatan kemajuan ekonomi, kendala peraturan perundang-undangan baik pusat maupun daerah yang menjadi penghambat bagi pertumbuhan perekonomian, terbatasnya penerapan dan penguasaan teknologi, serta terbatasnya kemampuan untuk membiayai pembangunan,” papar Novanto.

Novanto juga menghimbau Pemerintah agar mampu menjawab tantangan ini melalui berbagai kebijakan yang dikeluarkannya. Dengan begitu,



Ketua DPR RI Setya Novanto

ekonomi nasional kian menunjukkan kemandirian. “Kami meyakini bahwa ekonomi Indonesia akan tetap bertahan dan mampu mengatasi berbagai tantangan yang datang silih berganti. Indonesia diharapkan tetap mampu bersaing di tingkat regional maupun global dengan segala potensi yang dimiliki.”

Sambutan Novanto ini disampaikan di hadapan para peserta workshop. DPR sendiri memandang perlu menggelar acara ini untuk membuka cakrawala pemikiran dan mengetahui perubahan ekonomi dan sosial kontemporer. Banyak perubahan kebijakan ekonomi menyangkut sektor-sektor strategis nasional yang perlu dicermati oleh para anggota DPR RI. (mh) foto: iwan armanias/parle/hr

Janji-janji Pemilu Harus Turun Jadi Kebijakan Langsung



Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, aspirasi para buruh yang disampaikan ke DPR lebih banyak menagih janji-janji pemilu, sebagaimana diungkapkan Jokowi-JK di depan buruh pada kampanye lalu. Kalau kini mereka datang ke DPR dengan banyak tema seperti perbaikan kesejahteraan, mengkritisi kebijakan liberalisasi ekonomi yang berefek pada eksistensi pekerja, revisi UU Hubungan Industrial dan menagih janji membangun rumah untuk para pekerja, itu sebagai hal yang wajar.

Hal itu diungkapkan Fahri usai menerima Panitia Nasional Kongres ke-IV Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 1992 di ruang kerjanya Lantai IV Gedung Nusantara III Selasa (24/3)

Senayan, Jakarta. Delegasi SBSI 1992 yang hadir adalah Sunarti selaku Ketua Umum, Bejo (anggota) dan M. Zen Loilatu selaku Panitia Kongres. Kongres ke IV SBSI 1992 akan berlangsung pada 23-25 April 2015.

Lebih lanjut Pimpinan DPR Korkesra ini mengemukakan, itu semua harus mendapatkan penjelasan dari Pemerintah karena janji kampanye harus turun menjadi kebijakan langsung. Kemenaker seharusnya mengambil visi Presiden itu menjadi *platform* kementerian untuk dilaksanakan.

Dalam tahun anggaran sekarang, ungkap dia, Pemerintah masih menggunakan APBN Perubahan sehingga tidak sepenuhnya menjadi program Presiden. Tetapi paling tidak sudah bisa memulai identifikasi apa problem yang ada, sehingga para pekerja merasa didengar dan disalurkan aspirasinya.

“Mereka para pekerja berdemo datang ke DPR karena belum nyambung dengan eksekutif. Karena itu Pemerintah harus segera bertemu dan mendengar mereka untuk kemudian ditindaklanjuti,” tegas Pimpinan Dewan dari PKS ini.

Terhadap revisi UU Hubungan Industrial, Fahri mengatakan seharusnya proposal datang dari Pemerintah, sebab pernah dijanjikan pada saat kampanye dan DPR akan mendukungnya. Juga janji Presiden yang akan membangun 10 ribu rumah bagi pekerja, itu juga harus direalisasikan. Harus ada *roadmap* untuk merealisasikan janji-janji Presiden itu.

“Jangan diam saja, setelah dilantik dan menteri tenaga kerja juga telah dilantik janjinya tidak ditetapi, nanti rakyat marah,” ungkap Fahri mengingatkan. (mp)/foto:iwan armanias/parle/iw.

DPR Dukung Buruh Revisi UU PPHI

DPR berkomitmen akan terus mendukung usaha dan harapan para buruh Indonesia untuk merevisi UU No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Pasalnya Undang-undang yang telah masuk prioritas dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015 itu dinilai tidak aspiratif dan jauh dari kata keadilan.

Hal tersebut diungkapkan Wakil ketua DPR RI Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam), Fadli Zon yang didampingi Anggota Komisi IX, Rieke Dyah Pitaloka Senin (23/3) di Gedung DPR, Senayan, saat menerima perwakilan buruh dari berbagai organisasi buruh Indonesia seperti Forum Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSP-MI) Jawa timur, Aliansi Buruh Bekasi Bersatu, dan Forum Buruh DKI.



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon didampingi Anggota Komisi IX DPR Rieke Dyah Pitaloka menerima berbagai organisasi buruh Indonesia

“Kami berkomitmen segala sesuatu yang menjadi aspirasi masyarakat apalagi ini terkait dengan industrial, tentu akan kami dukung. Permintaan buruh untuk merevisi UU No.2 Tahun 2004 tentang PPHI itu juga telah menjadi prioritas prolegnas 2015 ini,” ungkap Fadli Zon.

Politisi dari Dapil Jawa Barat IV ini menjelaskan bahwa para buruh menilai Undang-undang tersebut merugi-

kan buruh, karena pada kenyataannya ketika ada perselisihan antara buruh dan industri (perusahaan-red), ternyata dalam proses penyelesaiannya tidak cepat, tidak murah dan cenderung tidak adil pada buruh.

“Buruh menilai biaya yang dikeluarkan dalam PPHI itu ternyata tidak murah, jika perselisihan hanya berkisar angka 10 juta namun untuk proses penyelesaiannya malah menelan biaya

berkali lipat dari yang dipermasalahkan. Belum lagi proses penyelesaiannya yang katanya memakan waktu bisa bertahun-tahun. Oleh karena itu pimpinan DPR beserta komisi terkait lainnya seperti Komisi VI dan komisi IX akan membahas permasalahan yang sudah menjadi prioritas prolegnas ini. Kami yakin dalam periode ini akan selesai,” paparnya. (Ayu)/foto:iwan armanias/parle/iw.

Masa Persidangan III, 8 RUU Dibahas

Setelah sukses mempercepat pembahasan beberapa RUU menjadi UU pada masa sidang sebelumnya, kini DPR berupaya memulai pembahasan kembali delapan RUU pada masa sidang III ini. Harapannya agar rakyat tidak terlalu lama menunggu hasil kerja legislasi di DPR RI.

Demikian disampaikan Ketua DPR RI Setya Novanto dalam Pidato sambutan Pembukaan Masa Sidang III di Rapat Paripurna, Senin (23/3). Delapan RUU tersebut, RUU Penyiaran, RUU Radio Televisi Republik Indonesia (RTRI), RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, RUU Arsitek, RUU Jasa Konstruksi, RUU perubahan atas UU Perbankan, RUU Penetapan Perppu tentang Perubahan atas UU No.30/2002 tentang KPK menjadi UU, RUU Perubahan atas UU No.28/2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dan RUU KUHP.

“Diharapkan pada masa sidang III ini, DPR akan melakukan terobosan yang sama agar rakyat tak perlu lama menunggu hasil kerja DPR di bidang legislasi,” kata Novanto. Sebelumnya, DPR telah sukses merumuskan UU No.42/2014 tentang MD3, UU No.1/2015 tentang Penetapan Perppu No.1/2014 tentang perubahan atas UU No.22/2014 tentang Pilkada, UU No.23/2014 tentang Pemda, dan UU APBN-Perubahan 2015.

“Pimpinan DPR mengharapkan agar Anggota dan Alat Kelengkapan DPR dapat mengoptimalkan seluruh sistem pendukung yang ada, termasuk tenaga ahli sehingga dapat semakin meningkatkan kinerja DPR di bidang legislasi,” kata Novanto lagi.

Pada bagian lain, Novanto juga menjelaskan dalam pidatonya seputar pembentukan Panitia Kerja (Panja) DPR



Ketua DPR RI Setya Novanto

yang akan mengawasi beberapa program pemerintah. Di antaranya, ada Panja Swasembada Pangan, Panja Mineral dan Batubara, Panja Ketenagalistrikan, Panja Penerimaan Negara, Panja Keselamatan, Keamanan, dan Kualitas Pembangunan Nasional, Panja Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH), Panja Kesehatan Haji, Panja BPJS Kesehatan, dan Panja Perekrutan PNS Tenaga Kesehatan.

Semua Panja ini penting untuk meningkatkan pelayanan publik. Bahkan, untuk meningkatkan peran pengawasan, DPR juga telah membentuk tim pengawas terhadap pelaksanaan pilkada serentak, rencana penggunaan dana desa, penegakan hukum, dan mengadakan uji kelayakan calon Kepala Kepolisian RI, dan calon Deputy Gubernur BI. (mh) / foto:iwan armanias/parle/iw.

Saatnya Buruh Miliki Think-tank Yang Kuat

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, pihaknya selalu terbuka untuk berkoordinasi terhadap masalah yang muncul di lapangan. Meski demikian dalam menyampaikan aspirasi atau masukan, delegasi masyarakat termasuk ge-



Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menerima SBSI

rakan buruh perlu mengidentifikasi anatomi persoalannya.

“Saya usulkan ada peta yang komprehensif dalam kerangka kerja yang solid. Saatnya buruh punya *think tank* yang kuat, sehingga kalau bicara datanya kuat, dan tuntutan serta usulannya bisa disetujui pemerintah,” kata Fahri saat menerima delegasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) 1992 dipimpin Ketua Umumnya Sunarti, Selasa (24/3) siang di Jakarta.

Dalam audensi ini SBSI 1992 mengharapkan kehadiran Pimpinan DPR dalam Kongres IV SBSI 1992 pada 23-25 April mendatang sekaligus memberikan saran dan masukan bagaimana para buruh bisa berperan lebih besar dalam pembangunan. “Kami undang baik dari kalangan DPR maupun Pemerintah dan pemangku kepentingan lain memberi kontribusi untuk buruh. Kita harapkan kepada generasi mendatang, jangan mereka tinggalkan utang dan persoalan,” tutur Sunarti.

Fahri Hamzah selanjutnya berharap, anatomi persoalan ini penting supaya DPR gampang terlibat dengan dukungan peta yang konkrit. Harapan SBSI ini kemudian akan disampaikan ke komisi terkait dan selaku Pimpinan Dewan, dia menyatakan siap saja kerja sama dan hadir dalam Kongres SBSI mendatang.

Kepada Delegasi SBSI, politisi PKS ini juga berharap agar

organisasi ini signifikan untuk menjadi *task force* perubahan, dan punya agenda sesuatu yang riil untuk diperjuangkan. “Kita tidak bisa mengalahkan siapapun kalau tidak terorganisir dengan baik. Cirinya adalah identifikasi jelas diiringi agenda dan tahapan yang juga jelas. Kalau ini dipenuhi kita bisa *action* bareng-bareng,” tandas Fahri.

Sunarti, Ketua Umum SBSI 1992 mengungkapkan pihaknya akan menggelar kongres sekaligus merayakan HUT diisi seminar soal globalisasi dan menyongsong masuknya era masyarakat ekonomi Asean (MEA) pada akhir tahun ini.

Bagi para buruh, masih adanya sistem *outsourcing*, sangat ditakuti. Seperti pegawai Pamdal merasa khawatir anak sekolah, tapi apakah kerjanya akan diperpanjang. “Ini jadi momok para buruh,” tegas Sunarti. Dengan akan diberlakukannya MEA, buruh mengeluhkan belum adanya sertifikasi bagi TKI dan dipertanyakan langkah pemerintah menyiapkan masalah ini.

Panitia Kongres ke-4 SBSI 1992 M. Zen Loilatu menjelaskan, sebanyak 6.000 buruh akan menjadi peserta. Sedangkan tema Kongres “Mensejahterakan buruh untuk memperkuat kemandirian bangsa.” Dia harapkan dalam momen itu DPR turut ambil bagian, sebab buruh adalah agen terbesar devisa Indonesia. (mp) foto: iwan armanias/parle/hr

Anggota DPR Diajak Jaga Martabat dan Wibawa Lembaga

Sehubungan dengan disahkannya Kode Etik dan Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Pimpinan DPR mengajak seluruh Anggota DPR untuk bersama-sama menjaga martabat dan wibawa lembaga DPR.

“Kita harus menerapkan ketertiban dan kedisiplinan di lembaga ini sebagaimana diatur dalam Peraturan DPR tentang Tata Tertib, misalnya berpakaian sopan, rapi, dan resmi serta tidak merokok dan tidak makan di ruang rapat,” tandas Ketua DPR Setya Novanto di depan Rapat Paripurna Senin (23/3).

Lebih lanjut Ketua DPR mengemukakan, dalam rangka penguatan kelembagaan, khususnya dalam rangka membangun DPR sebagai parlemen modern, DPR telah membentuk Tim Implementasi Reformasi DPR guna merealisasikan gagasan tersebut. Pimpinan mengharapkan Tim ini segera melakukan langkah-langkah kongkrit.

Guna memberikan pemahaman kepada Anggota DPR akan pentingnya penguatan dalam proses penyusunan APBN, ungkap Novanto, maka DPR akan mengadakan serangkaian *workshop* dengan tema utama “Kebijakan



Suasana Sidang Paripurna DPR RI

Ekonomi dan Sektor Strategis Nasional 2015 untuk Mempersiapkan Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan

RAPBN 2016”.

Sejumlah pakar ekonomi akan tampil diantaranya Ichsanudin Noorsi,

Revisond Baswir, Hendri Saporini, Yanuar Rizky, dan Achmad Erani Yustika. (mp)/foto:naeforudji/parle/iw.

PIA Gelar Fashion Show dan Talkshow *Bring Out Your Potential For Success*

Perempuan Perlu memberdayakan diri agar mampu memberdayakan lingkungan. Hal tersebut diungkapkan Ketua PIA (Persaudaraan Isteri Anggota) DPR RI, Deisti A Novanto usai membuka talkshow bertajuk *Bring Out Your Potential For Success* di Pustakaloka, Gedung Nusantara IV, Senayan Jakarta (25/3).

“Sebagaimana program kerja yang telah kami (PIA) susun bersama dimana selain berbuat untuk masyarakat luas dengan kegiatan sosial, kami juga harus terus membekali diri dengan pengetahuan-pengetahuan yang berguna bagi anggota PIA itu sendiri, sebagai pengembangan dan pemberdayaan diri anggota,” ungkap Deisti.

Dalam pertemuan tersebut hadir pakar etika sekaligus motivator Mien R. Uno yang menjelaskan bahwa sebagai isteri anggota DPR, anggota PIA harus menyesuaikan diri seiring karir suami dan juga harus menyesuaikan diri. Di antaranya lewat penampilan yang terbaik, perilaku dan sikap serta perilaku yang baik.

“Busana juga menyampaikan pesan penting secara non verbal (*first impression*) yang dapat menunjukkan rasa percaya diri,” ujar Mien Uno.

Misalnya, dilanjutkan Mien, untuk



Ibu-ibu PIA berfoto bersama pengisi acara

wanita berhijab, disarankan untuk tidak menggunakan celana panjang atau rok ketat sehingga membentuk tubuh. Termasuk juga tidak mengenakan baju tipis yang menerawang. Untuk penggunaan kerudung disarankan agar menyesuaikan warna dan motif busananya.

Dalam kesempatan itu juga digelar *fashion show* dari anggota PIA yang menampilkan berbagai rancangan dari disainer ternama seperti Itang Yunasz, Nita Senoadjie, dan Sjully D.

Dengan arahan koreografer Ari

Tulang, anggota PIA ini berlegakkengkok bak peragawati profesional.

“Meski bukan model profesional, namun ibu-ibu PIA ini terlihat cukup luwes membawakan busana dari para perancang ternama. Mereka sangat menjiwai rancangan tersebut yang memang sengaja dipilih sesuai dengan kepribadiann masing-masing,” ungkap Ari Tulang yang sangat mengapresiasi kegiatan PIA ini. (Ayu,Gt) foto: rizka/parle/hr

Arteria Dahlan Dilantik Jadi Anggota DPR



Pelantikan Anggota Antar Waktu dari PDI Perjuangan Arteria Dahlan

Kader PDI Perjuangan Arteria Dahlan Senin (23/3) dilantik menjadi anggota DPR menggantikan Djarot Saiful Hidayat yang kini menjabat Wakil Gubernur DKI Jakarta. Acara pelantikan anggota pengganti antar-waktu (PAW) ini berlangsung mengawali agenda Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan III tahun sidang 2014-2015.

Rapat Paripurna dihadiri lengkap Pimpinan Dewan yakni Ketua DPR Setya Novanto, didampingi wakil-wakil Fahri Hamzah, Fadli Zon, Agus Hermanto, dan Taufik Kurniawan. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang memandu acara pelantikan anggota PAW ini mengatakan, berdasarkan surat keputusan presiden nomor 21/P/2015 tanggal 2 Maret 2015 tentang pergantian antarwaktu, mengangkat Arteria Dahlan dari daerah pemilihan Jawa Timur VI menggantikan Djarot Saiful Hidayat.

Arteria Dahlan adalah anggota Dewan dari Partai De-

mokrasi Indonesia Perjuangan daerah pemilihan Jawa Timur VI, meliputi Kota Kediri dan Blitar. Arteria sebelumnya berprofesi sebagai pengacara. Arteria merupakan pengurus DPP PDI Perjuangan divisi hukum, maju menjadi caleg dari dapil Jawa Timur VI dengan nomor urut 4.

Fahri Hamzah mengharapkan Areteria bisa segera bekerja dalam mewakili aspirasi rakyat. “Diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan tugas-tugas konstitusional Dewan,” katanya. (as/si) foto: iwan armanias/parle/iw.

DPR Akan Panggil Presiden Joko Widodo Terkait Surat Calon Kapolri

Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu (Dapil Jakarta II) mengusulkan DPR agar segera mengundang Presiden Joko Widodo untuk menjelaskan surat pencalonan Kapolri Badrodin Haiti. Pasalnya, Selama ini Presiden Jokowi belum pernah sekalipun menjelaskan perihal pembatalan Calon Kapolri Budi Gunawan.

“Berkaitan dengan Calon Kapolri sebelumnya telah diputuskan pada tanggal 15 Januari yaitu Budi Gunawan untuk dilantik, kemudian kita tidak tahu apakah pelantikan itu dibatalkan atau ditunda,” ujarnya saat Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, di Gedung Nusantara III, Senin, (23/3).

Menurutnya, karena Indonesia merupakan negara hukum seharusnya semua mengacu



Anggota DPR dari Fraksi PDIP Masinton Pasaribu

kepada konstitusi dan peraturan UU lainnya, dan untuk DPR RI harus segera menyikapi secara tegas keputusan Paripurna DPR RI yang telah menyepakati dan memutuskan Calon Kapolri. “Ini mengganggu marwah DPR karena itu kita harus memanggil dan meminta penjelasan kepada Presiden Jokowi terkait surat itu,” jelasnya.

Dia menegaskan, Presiden Jokowi telah menganggangi marwah dan kewenangan DPR RI karena itu harus segera diminta penjelasannya terkait suratnya. “Kita berharap dengan pemanggilan itu tidak terulang lagi peristiwa ketika diminta persetujuan kemudian dibatalkan, jadi harus mengikuti tata perundang-undangan,” paparnya. (sugeng/agung) foto:naeforudji/parle/iw.

Usulkan Bentuk Panja Kebutuhan Sembilan Bahan Pokok

Anggota DPR dari Fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka mengusulkan segera dibentuk Panja Kebutuhan Pokok untuk meminta penjelasan terkait kenaikan sembilan bahan pokok yang semakin membebani masyarakat.

“Saya mendukung segera dibentuk Panja guna meminta penjelasan pemerintah terkait kenaikan kebutuhan pokok agar tidak semakin liar,” ujarnya saat Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, di Gedung Nusantara III, Senin, (23/3).

Di sisi lain, dirinya menyoroti persoalan harga BBM yang mulai mengikuti harga pasar yang berakibat kenaikan harga BBM ini memunculkan dampak domino bagi rakyat kecil khususnya kaum buruh.

“Seharusnya UU No. 22 tahun 2001 pasal 28 ayat 2 yang berbunyi harga eceran bahan bakar minyak dan gas bumi dalam negeri diserahkan kepada mekanisme persaingan usaha yang wajar telah dicabut berdasarkan keputusan MK tahun 2014. Ini yang harus disikapi bersama jangan diam seolah-olah DPR RI tidak mengertai hasil MK tersebut,” jelasnya.

Sementara, Anggota DPR RI dari Fraksi PAN Yandri Susanto (Dapil Banten II) meminta DPR RI segera menyikapi



Anggota Komisi IX DPR Rieke Diah Pitaloka di Sidang Paripurna

terkait tingginya harga sembilan bahan pokok seperti beras, bawang merah dan sebagainya. “Itu mesti disuarakan sehingga sebagai wakil rakyat dapat merasakan penderitaan rakyat akibat naiknya harga bahan pokok,” paparnya.

Menurutnya, kita harus memiliki komitmen yang besar terkait persoalan aktual yang menimpa rakyat kecil. “Ini tidak disinggung di dalam pidato pembukaan masa sidang, sehingga kita tidak dicemooh dan betul-betul memperjuangkan aspirasi rakyat,” katanya. (Sugeng/Agung) foto: naefurodji/parle/hr

Bentuk Kaukus Dapil Untuk Himpun Isu Spesifik



Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Sidang III Tahun 2014-2015

Ketua DPR Setya Novanto menegaskan, masa reses merupakan salah satu upaya untuk mendekatkan anggota kepada konstituennya guna melaksanakan fungsi representasi. Untuk efektivitas pelaksanaan fungsi representasi ini, Pimpinan DPR mendorong agar masa reses dimanfaatkan dengan lebih baik misalnya dengan membentuk Kaukus berdasarkan daerah pemilihan (dapil) untuk menghimpun isu spesifik

yang berkembang.

Hal itu dikemukakannya ketika menyampaikan pidato Pembukaan Masa Persidangan III tahun sidang 2014-2015 di Jakarta, Senin (23/3).

Setya Novanto yang didampingi Wakil-wakil Ketua DPR Agus Hermanto, Fahri Hamzah, dan Taufik Kurniawan serta Fadli Zon selanjutnya mengharapkan, melalui Kaukus ini dapat dicarikan solusi terhadap berbagai isu pemba-

ngunan di daerah melalui kebijakan-kebijakan yang ditetapkan di DPR.

Ia menyebutkan, dalam UU tentang MD3 khususnya Pasal 227 ayat (1) dan Pasal 195 Peraturan DPR tentang Tata Tertib dinyatakan bahwa setiap anggota DPR berhak mengawasi pelaksanaan APBN dan memperjuangkan program pembangunan bagi kepentingan masyarakat termasuk di daerah pemilihannya. Tugas-tugas penyerapan aspirasi masyarakat ini lebih intensif dilaksanakan pada masa reses.

Sedangkan untuk menyusun mekanisme penyampaian aspirasi dan pengusulan program pembangunan daerah pemilihan, telah dibentuk Tim Mekanisme Penyampaian Hak Mengusulkan dan Memperjuangkan Program Pembangunan Daerah Pemilihan.

Untuk itu, lanjutnya, Pimpinan mengharapkan agar Tim ini segera memulai kegiatannya. Mekanisme tersebut juga akan diatur dalam Rancangan Perubahan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.

“Kita berharap agar perubahan Tata Tertib tersebut segera diajukan oleh Badan Legislasi untuk mendapatkan persetujuan paripurna,” harap Setya Novanto. (mp)/foto:naefurodji/parle/iw

Perlu Langkah Konkret Kontrol Pergerakan Rupiah

Terkait dengan fenomena depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat yang terjadi akhir-akhir ini, DPR meminta perhatian Pemerintah mengambil langkah konkret untuk mengontrol pergerakan nilai rupiah agar tidak terpuruk.

“Rupiah tentu harus menjadi tuan di negeri kita. Segala potensi yang mengancam stabilitas rupiah perlu ditangani secara menyeluruh,” kata Ketua DPR Setya Novanto saat membacakan Pidato Pembukaan Masa Persidangan III tahun 2014/2015 di Jakarta, Senin (23/3).

Menurut Ketua DPR, ancaman itu an-



Pimpinan DPR RI

Para lain defisit transaksi berjalan yang harus dibenahi pada masalah-masalah dasarnya yaitu memberikan insentif fiskal yang maksimal kepada usaha ekspor kita dan mendorong produksi dalam negeri sebagai pengganti barang-barang impor.

“Kebijakan fiskal yang baru diterbitkan oleh pemerintah masih kurang untuk mendorong penguatan mata uang rupiah,” ungkapnya.

Untuk mendorong penerimaan negara, DPR berpandangan bahwa diperlukan percepatan pengajuan RUU

Perubahan atas UU Nomor tentang 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Bahkan jika diperlukan DPR akan menginisiasinya lebih awal.

Demikian juga terhadap RUU Perubahan Atas UU tentang Perbankan yang dinantikan untuk mempercepat terbentuknya arsitektur perbankan nasional yang lebih handal dan kompetitif, DPR akan pula menginisiasinya. Kedua RUU Perubahan tersebut sangat diperlukan untuk menunjang stabilitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. (mp)/foto:andri/parle/iw.

Pemberian Remisi Koruptor Masih Wajar

Rencana pemerintah yang akan memberi remisi terhadap para tahanan koruptor dinilai masih wajar, karena mereka diharuskan mengembalikan uang hasil korupsinya. Selain itu, masih menjalani tahanan. Demikian dikatakan anggota Komisi III DPR Ali Umri di Jakarta, Rabu (25/3)

Menanggapi rencana pemberian remisi koruptor yang digulirkan Menkumham tersebut, Ali Umri menambahkan, bahwa seorang terpidana yang sebelumnya memegang suatu jabatan sudah pasti akan diberhentikan dari jabatannya. Di sisi lain mereka sudah bertobat dan juga sanksi dimiskinkan. “Saya kira wajar diberikan potongan hukuman bagi para terpidana korupsi,” jelasnya.

Pemberian remisi, kata Politisi Fraksi partai Nasdem yang melakukan kunjungan kerja ke daerah, menemukan ada lembaga permasyarakatan yang kapasitasnya 300 orang, tetapi diisi 1000 orang lebih, akibatnya terjadi kelebihan kapasitas.

“Kejadian seperti ini sudah dianggap melanggar HAM karena sudah tidak manusiawi lagi. Apalagi selama dalam tahanan sudah berubah dan menunjukkan perilaku yang baik, maka pemerintah berpandangan untuk memberikan remisi terhadap mereka,” katanya.

Lebih lanjut Ali mengatakan, dengan diberikannya pengurangan hukuman diharapkan dapat membina keluarganya kemudian bertobat. “Tuhan saja mau memberikan ampunan apalagi kita manusia. Dipastikan mereka akan jera karena uang sudah tidak punya, jabatan juga sudah tidak ada, kemudian di tengah masyarakat pun dikucilkan, maka wajar kalau diberikan remisi,” ujarnya lagi.

Sementara pakar hukum tata negara Said Salahudin mengatakan, sebagai negara hukum maka hukum-hukum nor-



Anggota Komisi III DPR Ali Umri

matik harus menjadi rujukan. Kalau koruptor dikaitkan pada perilaku, maka perlakuan terhadap pelaku korupsi tentu harus dibedakan dengan begal motor, maling dan copet.

Korupsi adalah kejahatan yang luar biasa sehingga perlakuannya harus berbeda dengan kejahatan biasa. Korupsi itu adalah musuh bersama bangsa, maka banyak orang yang kecewa ketika para pejabat pemerintahan melakukan korupsi dan publik menjadi marah terhadap tindakan mereka.

“Sebagai kejahatan yang luar biasa juga dengan tingkat kebencian tinggi, maka perlakuan Menteri Hukum dan HAM harus dipandang sebagai bentuk ketidakseriusan pemerintah untuk memberantas korupsi,” kata Salahudin dengan menambahkan, pemberian remisi menunjukkan tidak ada *good will* dari pemerintah dalam rangka pemberantasan korupsi.

Dikatakan, apa yang selama ini digembar-gemborkan pemerintah hanya merupakan pepesan kosong saja jika benar akan memberlakukan remisi terhadap tahanan koruptor. (spy) foto: andri/parle/hr

Bahas Soal Rupiah, DPR dan Pemerintah Hasilkan 7 Kesimpulan

Menanggapi nilai tukar Rupiah yang melemah terhadap Dolar Amerika, serta untuk mengetahui kondisi ekonomi terkini, Komisi XI DPR mengadakan rapat kerja dengan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa

Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Rapat berlangsung di ruang rapat Komisi XI, Gedung Nusantara I, Rabu (26/03/15).

Rapat yang dipimpin Ketua Komisi XI Fadel Muhammad ini



Pimpinan Komisi XI DPR saat Raker dengan Menkeu, BI, OJK, dan LPS

menghasilkan tujuh kesimpulan, usai mendapatkan paparan dari Menkeu, Gubernur BI, Ketua Dewan Komisiner OJK dan Ketua Dewan Komisiner LPS.

Pertama, Komisi XI memandang bahwa perkembangan fluktuasi nilai tukar rupiah pada saat ini dalam rentang yang harus mendapat perhatian secara khusus oleh pemerintah dan Bank Indonesia (BI) karena sangat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi rakyat Indonesia.

“Berikutnya, Komisi XI meminta kepada Pemerintah dalam rangka meminta kepada Pemerintah dalam rangka perbaiki defisit transaksi berjalan perlu menjalankan paket kebijakan yang ditujukan perbaikan struktural ekonomi yang berkelanjutan dengan tetap memperhatikan aturan perundang-undangan yang berlaku,” jelas Fadel.

Kesimpulan ketiga, tambah Politisi F-PG ini, Komisi XI meminta kepada Pemerintah terkait paket kebijakan yang mewajibkan penggunaan L/C untuk ekspor sumber daya alam yaitu minyak kelapa sawit, batu bara, hasil tambang, dan

migas diwajibkan adanya sanksi sehingga kebijakan tersebut dapat terlaksana dengan efektif.

Kemudian, lanjut Fadel, Komisi XI meminta kepada Pemerintah, Bank Indonesia dan OJK untuk melaksanakan amanat Undang-Undang No.7 Tahun 2011 tentang mata uang yang mewajibkan semua transaksi jual beli barang dan jasa di dalam negeri menggunakan Rupiah.

“Khususnya, hal ini terkait dengan masih banyaknya Instansi Pemerintah dan BUMN yang bertransaksi dengan mata uang asing. Kami minta pemerintah segera memerintahkan instansi pemerintah dan BUMN tersebut untuk melaksanakannya dan mengenakan sanksi bagi yang tidak mengindahkannya,” tegas Politisi asal Dapil Gorontalo ini.

Berikutnya, Komisi XI meminta kepada Pemerintah untuk menyiapkan paket kebijakan yang dapat mendorong ekspor manufaktur dan pertumbuhan industri substitusi impor dengan kebijakan investasi dalam rangka pengurangan ketergantungan impor bahan baku dan penolong industri nasional.

“Komisi XI juga meminta kepada pemerintah untuk melaksanakan upaya-upaya khusus, seperti peningkatan kepatuhan Wajib Pajak, perbaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak, dan perluasan basis pajak, namun tanpa mengganggu kondusivitas kegiatan dunia usaha terkait dengan target Penerimaan Negara dari perpajakan dalam APBN Perubahan Tahun 2015,” imbuh Fadel.

Kesimpulan terakhir, dalam rangka mewujudkan sistem keuangan inklusif, Komisi XI meminta kepada OJK untuk melakukan penyiapan kelembagaan, sumber daya manusia, dan aturan agar kebijakan tersebut mampu mendorong pertumbuhan ekonomi terutama UMKM. (sf) foto: naefurodij/parle/hr

Panja BPIH Temukan Sejumlah Masalah Haji di Tanah Suci



Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay dan Ketua serta anggota Panja BPIH saat menggelar Konferensi Pers

Komisi VIII DPR RI menemukan belum adanya uang muka yang diberikan dalam proses penyediaan pemondokan di Mekkah dan Madinah, pemberian uang muka bagi catering, dan pemberian uang muka bagi layanan transportasi shalawat dan upgrade Naqobah (transportasi).

Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi VIII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay dan Ketua serta anggota Panja BPIH Komisi VIII kepada wartawan terkait hasil temuan Panitia kerja Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Panja BPIH) 2015 di Tanah Suci, Rabu (25/3)

“Pada tanggal 29 Januari 2015 lalu Menteri Agama telah meminta persetujuan untuk membayar uang muka sebesar 1,74 Triliun kepada Komisi VIII DPR RI, persetujuan itu dilakukan agar

proses rekrutasi mitra-mitra tersebut dilaksanakan lebih awal. Namun saat kedatangan kami 15-21 maret 2015 kemarin belum ada uang muka yang dibayarkan,” ungkap Saleh.

Belum dibayarnya uang muka tersebut ditambahkan Ketua Panja BPIH, Sodik Mudjahid dapat mengakibatkan pembengkakan cost atau biaya beberapa elemen tersebut. Karena bukan tidak mungkin harga dari berbagai elemen haji itu naik. Hal tersebut pada akhirnya akan membebaskan calon jemaah haji.

“Tidak hanya itu pengadaan penyediaan pemondokan, *catering* dan *upgrade*

bis shalawat tidak dilakukan melalui proses tender, tetapi menggunakan negosiasi langsung dengan terlebih dahulu melewati tahapan-tahapan pengumuman, penerimaan berkas, verifikasi berkas, pengukuran jarak, pemeriksaan akomodasi, pengukuran luas kamar, rencana penempatan, penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS), usul penyedia akomodasi dan negosiasi. Proses tersebut selain menyita waktu juga rawan penyimpangan,” tambah Sodik.

Temuan selanjutnya dikatakan Politisi dari Fraksi Partai Gerinda adalah terkait *catering*. Dimana ditemukan

banyak informasi proses subkontraktor pekerjaan *catering* dengan harga yang ditetapkan atau dibayar kementerian agama.

“Mereka mintanya 12 riyal tapi ternyata harganya hanya berkisar antara 4 sampai 8 riyal, akibatnya kualitas atau mutu serta menu makanan yang diterima calon jemaah haji nantinya akan jauh dibawah standar. Terkait semua temuan ini kami sudah menyampaikan kepada Dirjen Perjalanan Haji dan Umrah (PHU) serta Itjen Kemenag agar segera dibenahi,” tegasnya. (Ayu,RN)

foto: andri/parle/hr

PIA DPR Gelar Bakti Sosial Untuk Anak-anak Gunungkidul

Persaudaraan Isteri Anggota (PIA) DPR RI mengunjungi sanggar Bosskid, singkatan dari Bocah Sisih Kidul (anak sebelah selatan) di Padukuhan Ngasem, Tepus, Gunungkidul, Sabtu (21/03) lalu. Anak-anak, Pembina, dan ibu-ibu Bosskid didampingi Muspika Tepus juga tampak menyambut para istri wakil rakyat ini.



Deisti A Novanto (kanan) memberikan sambutan

Rombongan yang dipimpin oleh Ketua PIA Periode 2014-2019 Deisti A Novanto, memberikan pengarahannya sekaligus bantuan seperti buku bacaan, alat peraga, berbagai alat tulis dan sejumlah dana.

“Memang yang menjadi perhatian



Tim Baksos PIA DPR bersama anak-anak, pembina Bosskid, dan Muspika Gunung Kidul

kami pada desa Tepus ini setelah mendengar bahwa daerah ini selalu mengalami kekeringan. Kami merasa terpacu untuk langsung melihat lokasi dan berjumpa dengan komunitas yang harus dikembangkan ini,” ujar Deisti pada sambutannya di rumah sanggar Bosskid.

Bosskid adalah sanggar swadaya masyarakat sudah berdiri sejak tahun 2007 dipelopori tokoh warga bernama Juni Sunarto. Saat ini anggotanya sudah mencapai ratusan anak. Tujuannya untuk pengembangan minat dan bakat, serta pelestarian kebudayaan lokal. Awal perjalannya sempat terseok-seok yang kemudian Bosskid mendapat bantuan untuk mengelola sebuah yayasan.

Lebih lanjut Deisti mengungkapkan harapannya kepada anak-anak dan para pembina agar terus bersemangat menggapai apa yang diinginkan. Dengan melihat langsung, kami ikut bangga dengan apa yang telah diupayakan di sini. Bantuan yang kami bawa diharapkan makin menumbuhkan minat baca dan belajar, membuka wawasan tentang alam semesta, walaupun anak-anak kami ini tinggal di daerah yang jauh,” kata Deisti.

Usai meninjau sanggar, ibu-ibu PIA juga menyempatkan untuk menengok kegiatan latihan karawitan anak di SD Tepus I dan depot makan yang dikelola Koperasi Bosskid di puncak Pantai Pulang Syawal, Gunungkidul. (ray) *foto: rizka/parle/hr*

Banyaknya Temuan Panja BPIH Indikasi Lemahnya Posisi Tawar Tim Haji Indonesia



Konferensi Pers Panja BPIH

Banyak pondokan calon jemaah haji dalam satu sektor (wilayah) yang masih bisa dikontrak oleh pemerintah Indonesia. Namun, Kementerian agama sebagai operator penyelenggara haji malah memilih sektor lainnya. Hal ini membuat sebaran jemaah haji makin luas.

Padahal menurut Ketua Panja BPIH Komisi VIII DPR, Sodik Mudjahid jika proses rekrutasi lebih proaktif maka akan semakin banyak pondokan

jemaah haji Indonesia yang disewa dalam satu sektor, sehingga sebaran jemaah haji dapat semakin terkonsentrasi. Hal tersebut menjadi salah satu temuan Panja BPIH saat investigasi ke tanah suci pada 15-21 Maret kemarin.

“Itu hanya salah satu dari hasil temuan Panja BPIH Komisi VIII, banyak temuan lainnya, yakni masalah ketidaksesuaian data antara data di Indonesia dengan data di Arab Saudi, seperti jumlah kloter,” ungkap Sodik.

Sodik yang didampingi oleh Ketua Komisi VIII, Saleh P Daulay, serta anggota Panja BPIH Komisi VIII seperti Abdul Fikri Faqih dan Khatibul Umam Wiranu dihadapan wartawan mengungkapkan bahwa masih lemahnya *bargaining position* (posisi tawar) Tim Haji Indonesia di mata *muassasah* dan di mata pemerintah Arab Saudi dalam banyak hal, termasuk pengelolaan haji sehingga dalam beberapa hal menambah beban biaya yang seharusnya menjadi beban *Muassasah*.

“Tambahan biaya yang dibebankan kepada calon jemaah haji, padahal seharusnya menjadi beban *muassasah* antara lain pengadaan tenda ber AC, *upgrade* karpet di Armina. Sementara itu ketersediaan toilet saat ini masih dalam tahap diupayakan oleh *Muassasah* karena menjadi tanggung jawabnya,” jelas Politisi dari Fraksi Partai Gerinda ini.

Sodik meyakini bahwa pihaknya sudah melakukan pembicaraan terkait temuan tersebut kepada jajaran kementerian agama. Ia berharap Kemenag dapat memperbaiki segala temuan Panja BPIH, semata untuk memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji, serta terciptanya penyelenggaraan haji dengan Pola baru yang lebih baik, transparan dan akuntabel.

(Ayu,Gt) foto: andri/parle/hr

Anggota Dewan Apresiasi Workshop Kebijakan Makro Ekonomi

Workshop yang diadakan di Ruang Pansus C Gedung Nusantara II, Gedung DPR dengan tema Kebijakan Makro Ekonomi, Kebijakan Moneter Keuangan dan Perbankan, Rabu (25/3) mendapat komentar positif dari anggota Komisi XI Indah Kurniawati. “Saya sangat senang dengan adanya pertemuan seperti ini. Hal inilah yang kami harapkan untuk meningkatkan kualitas individu anggota dan membuat kita semakin tahu arah kita kemana,” ungkapnya.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan ini



Suasana Workshop Kebijakan Makro Ekonomi, Moneter Keuangan dan Perbankan



mengungkapkan bahwa kegiatan ini sangat mendukung dalam menjalankan tugas dan fungsi Komisi XI. “Mengingat Komisi XI bermitra kerja dengan pemerintah di bidang ekonomi keuangan dan perbankan. Selain itu juga Bank Indonesia, OJK, dan Menteri Keuangan dan Core Indonesia, akan senantiasa bersama dengan DPR untuk mencerdaskan kita semua,” jelasnya.

Menurutnya, mengingat kegiatan workshop ini akan dilaksanakan selama 3 tahap selanjutnya, manfaat

yang akan diperoleh lebih banyak lagi dan bukan hanya untuk Komisi XI tetapi bagi semua anggota DPR RI. “Saya rasa tidak hanya terbatas kepada Komisi Keuangan dan Perbankan tetapi saya pikir seluruh komisi di DPR ini perlu untuk kita bertemu dalam suasana yang berkualitas seperti ini,” ungkapnya.

Selain itu manfaat konkrit dari kegiatan ini adalah, dapat lebih mengetahui permasalahan dunia karena mendatangkan pakar-pakar pada acara ini. Dibandingkan dengan mendengarkan

informasi-informasi dan wawasan, menggali data, mencari informasi, *searching* membutuhkan waktu yang cukup lama sementara waktu yang dimiliki anggota Dewan terbatas.

“Saya merasa senang bisa hadir dan mendengarkan sari pati dari 3 narasumber yang cukup bagus yakni Yanuar Rizky, Prasetyantoko dan Ahmad Erani Yustika meskipun kebetulan sahabat saya Erani sedang sakit, kalau dia hadir mungkin akan lebih jelas lagi,” tutupnya. (mp,ds) foto: iwan armanias/parle/hr

Workshop Ekonomi dan Sosial, Informasi Jelang Pembahasan Pendahuluan RAPBN 2016

Sekjen DPR Winantuningtyastiti mengatakan, *workshop* masalah ekonomi dan sosial baru pertama kali diadakan, khususnya bagi anggota DPR periode 2014-2019. “Kami memahami betul betapa pentingnya fungsi anggaran DPR. Karena itu seijin Pimpinan DPR, Setjen DPR melakukan inisiasi dengan bekerja sama Center Of Reform and Economics (CORE) Indonesia dibawah kepemimpinan Hendri Saparini, untuk mensupport informasi terkait dengan ekonomi makro dan sub tema lainnya.

Hal itu dikatakannya saat menyampaikan sambutan pada acara *Workshop* di Ruang Pansus C Gedung DPR, Senayan, Rabu (25/3). Acara yang dibuka oleh Ketua DPR Setya Novanto akan berlangsung secara berkelanjutan, tahap pertama dilakukan empat sesi pertemuan, pertama tanggal 25 Maret, kemudian pada 1 April, 8 April dan 13 April.

Ditambahkan Win-panggilan akrab Sekjen DPR, *workshop* dimaksudkan untuk menyampaikan informasi dan pandangan masalah ekonomi dari pakar ekonomi dan ini juga momen untuk menyampaikan informasi terkait



Sekjen DPR RI Winantuningtyastiti memberikan sambutan pada pembukaan *Workshop*

dengan pembahasan pendahuluan RAPBN 2016 yang akan dimulai pada Mei mendatang.

Kepada para anggota Dewan, dia berharap para anggota Dewan bisa mengikuti acara ini guna mendapatkan informasi yang komprehensif dan saling terkait. Dengan demikian akan bermanfaat pada saat mengambil keputusan pembahasan RAPBN.

Harapan yang sama disampaikan Hendri Saparini dari Center Of Reform and Economic (Core) Indonesia. Dise-

butkan bahwa Core Indonesia merupakan *think tank*, tidak hanya melakukan kajian tetapi juga ingin menjadi jembatan. “Apa yang kami lakukan adalah kajian, kemudian mensosialisasikan baik kepada DPR maupun eksekutif. Kami banyak melakukan diskusi dengan pelaku maupun pengambil kebijakan dan ingin sekali hubungan kerja sama ini bermanfaat,” tutup Hendri Saparini. (mp) foto: iwan armanias/parle/hr

UU Perbankan Terlalu Liberal

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Gus Irawan Pasaribu menilai UU No.7 tahun 1992 dan UU No.10/1998 tentang Perbankan ini merupakan warisan IMF sehingga dalam pelaksanaannya cenderung liberal, akibatnya, asing bisa

memiliki saham perbankan di negeri ini sampai 99 persen.

“Karena itu, Komisi XI DPR RI berinisiatif untuk merevisi UU tersebut agar sesuai dengan semangat Keindonesiaan,” tegas Gus Irawan dalam dis-

kusi Forum Legislasi yang bertepatan ‘Revisi UU Perbankan’ di Gedung DPR, Jakarta, (24/3), diskusi dihadiri juga anggota Komisi XI DPR Misbakhun, Deputy Gubernur BI Halim Alamsyah dan mantan Menkeu RI Fuad Bawazier.



Wartawan Koordinator DPR mengikuti Konferensi Pers

Menurut Gus Irawan, jika ini dibiarkan, maka bisa bertentangan dengan semangat Pancasila dan UUD 1945, “Revisi UU Perbankan ini akan memberi ketegasan terhadap aturan yang bersifat abu-abu, termasuk pengawasan oleh otoritas jasa keuangan atau cukup dengan Bank Indonesia,” jelas Gus Irawan yang juga politisi dari Partai Gerindra ini.

Selain itu, pada kesempatan ini, Gus Irawan yang juga Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perbankan menjelaskan, pihaknya telah melakukan kunjungan ke dua daerah untuk meminta masukan dari masyarakat terkait penyusunan RUU ini. Kedua daerah tersebut adalah Makassar dan Surabaya. Permintaan masukan ini dilakukan dalam rangka menyusun RUU Perbankan.

“Meski draf RUU Perbankan sudah disiapkan periode lalu, akan tetap jadi referensi, karena di DPR tidak mengenal istilah *carry over*,” terangnya.

Ada sejumlah substansi yang akan masuk pembahasan dalam RUU ini. Mulai dari kepemilikan asing, asas resiprokal, hingga penegasan tugas dan fungsi antara BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait dengan sektor perbankan. Menurutnya, penegasan tugas dan fungsi ini penting agar terjalin komunikasi yang baik antara kedua lembaga tersebut.

“Pengawasan bank di UU OJK, makroprudensial tetap di BI, tapi belum ditegaskan apa saja, supaya industri tidak bingung dan tidak harus lapor kedua-duanya,” tutup Gus Irawan.

Sementara itu, menurut anggota Komisi XI DPR Misbakhun menjelas-

kan, mengenai bank asing itu jangan selalu berpandangan negatif, karena untuk membangun sistem perbankan nasional masih membutuhkan dana yang cukup besar. Apalagi untuk membiayai pembangunan infrastruktur itu kita masih kesulitan uang.

“Jadi, kita harus melihat asas manfaat bank asing itu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Karena itu, UU ini jangan terlalu kaku, tapi fleksibel agar kita sendiri tidak terjebak di kemudian hari,” ujarnya.

Hanya saja dia mengusulkan perlunya merger bank mengingat jumlah bank kini terlalu banyak sehingga cukup 15 bank saja di Indonesia. Dengan jumlah bank yang cukup, maka pengawasannya akan lebih mudah. Juga tidak mempermudah bank-bank konvensional menjadi bank syariah.

Sebab, bank syariah yang muncul belakangan ini hanya formalitas, hanya mengganti istilah saja, tapi dalam praktiknya sama saja. “Maka revisi UU ini menjadi pertarungan bagi DPR RI dan kalau berhasil akan menjadi prestasi awal Komisi XI DPR RI untuk melahirkan perbankan yang efisien, bukan menjadikan industri bank yang liberal, dan tidak melindungi konsumen, nasabah, dan mengabaikan pembangunan,” tambah Misbakhun.

Menurut Deputy Gubernur BI Halim Alamsyah, adanya bank asing di Indonesia dibanding luar negeri masih tergolong kecil, hanya 28 persen di India, 20 persen Brasil, 20 persen, Rusia 28 persen dan lain-lain. Faktanya pun bank Indonesia tidak kalah saing dengan asing.

“Bank asing itu hanya bergerak di bidang *fee*, jasa dan devisa, karena mempunyai jaringan internasional. Dan, karena kita sebagai anggota G 20, maka tak bisa lepas dari aturan internasional sesuai ketentuan G 20. Dalam pemberian kredit bank asing hanya 7 persen, bank campuran hanya 14 persen, swasta hanya 45 persen dan nasional hanya 46 persen. Bank asing pun hanya mempunyai cabang di 10 kota,” tutur Alamsyah.

Yang menjadi masalah kata Alamsyah, bank asing itu bisa membeli bank-bank kecil Indonesia. Hal itulah yang harus diatur, namun tidak melalui UU, melainkan cukup peraturan pemerintah (PP) atau oleh OJK.

Seperti halnya kasus *bailout* Bank Century, seharusnya itu tidak dilakukan karena akan merugikan keuangan negara, melainkan dengan *bailin*, yaitu kerugian bank itu menjadi tanggung jawab pemilik bank itu sendiri. “Kalau pemiliknya tidak sanggup, maka negara baru boleh membantu,” tambahnya.

Mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier juga mengakui jika UU Perbankan itu liberal dan menjadikan utang luar negeri Indonesia cenderung meningkat dan dahsyat, karena sumber-sumber di dalam negeri cenderung berkurang. “Jadi, harus hati-hati dengan perkembangan perbankan kita sekarang ini,” katanya.

Menurut Fuad Bawazier sebelum era reformasi, bank-bank nasional masih menjadi tuan rumah di negeri sendiri. “Ketika terjadi krisis moneter, menjadi pintu masuk untuk intervensi asing, melalui IMF untuk mulai membuat rezim baru dalam hal perbankan. Masuknya asing setelah *letter of intent* (LoI) dengan IMF, maka Indonesia sangat tertekan baik terhadap bank swasta dan nasional,” ujarnya.

Karena itu, Indonesia tidak boleh mabuk dengan puja-puja asing, maka dalam revisi UU Perbankan ini tidak membuka ruang mengenai asas resiprokal, yakni apa yang bisa dilakukan oleh asing di Indonesia berlaku juga sebaliknya di luar negeri.

“Mengapa, Karena kalau punya resiprokal, asing itu sudah siap ngerjain Indonesia, sedangkan kita tidak mempunyai persiapan apa-apa atau baru rencana saja. Sehingga ketika kita sudah siap, pasar sudah jenuh, maka asing melakukan ekspansi,” jelas Fuad.

(nt/sc) foto: naefurodji/parle/hr

Baleg DPR Audiensi Dengan DPRD Sorong dan Tegal

Badan Legislasi DPR RI menerima kunjungan DPRD Kota Sorong dan DPRD Kota Tegal. Kedua delegasi ini menyampaikan aspirasi mengenai hak protokoler dan hak keuangan, yang diterima langsung oleh Ketua Baleg Sareh Wiyono di ruang rapat Baleg, Gedung Nusantara I, Selasa (24/03/15).

“Keduanya satu misi dalam menyampaikan mengenai keprotokoleran dan hak keuangan, atau yang kita bisa sebut uang pensiun Anggota DPRD. Mereka menjelaskan, Anggota DPRD di daerah-daerah, seperti tidak dihargai, karena besaran uang pensiun usai menjabat selama lima tahun, tidak sesuai dengan yang diharapkan,” jelas Sareh, usai acara.

Politisi asal Dapil Jawa Timur VIII ini menjelaskan, sebenarnya mengenai hak keuangan, bisa dibahas dengan Pemerintah Daerah masing-masing, melalui bantuan kesejahteraan ketika Anggota DPRD tersebut memasuki masa pensiun. Pembahasannya, juga melibatkan DPRD Tingkat I dan Asosiasi DPRD Kota atau Kabupaten, termasuk dengan Kementerian Dalam Negeri dan Komisi II DPR RI.

“Kita minta mereka segera membuat surat, dan bekerjasama dengan DPRD Tingkat I dan Asosiasi DPRD Kota atau Kabupaten, duduk bersama dengan Kemendagri, dan Komisi II DPR RI. Karena ini adalah kewenangan dari Komisi II DPR, dari Baleg hanya mendorong. Apalagi mereka meminta aturan itu dapat dituangkan menjadi Undang-undang,” tambah Sareh.

Politisi Fraksi Gerindra ini mengaku, pihaknya tidak dapat berbuat banyak mengenai persoalan ini. Ia pun sangsi, permintaan ini dapat dituangkan menjadi UU. Mengingat, pembahasan ini sebenarnya bisa dilakukan di daerah masing-masing dengan eksekutifnya, DPR tidak bisa campur tangan terhadap hal ini.

“Kami tidak dapat berbuat banyak dalam memberikan saran kepada seluruh Anggota DPRD. Jika hal ini harus dimasukkan ke dalam UU, ini kan memerlukan suatu mekanisme, adanya naskah akademik, dan disampaikan dengan baik. Mereka tadi dapat menerima saran dari kami, dan akan menindaklanjutinya di daerah,” tukas Sareh.

Sebelumnya, Ketua DPRD Kota Tegal Edi Suripno menjelaskan, penyampaian aspirasi ini mewakili permasalahan yang melanda DPRD Tingkat II di seluruh Indonesia. Ia berharap, aturan mengenai protokoler ini dapat direvisi.

“Setahu saya selama 10 tahun ini, protokoler ini tidak mengalami peningkatan dan perbaikan. Untuk itu, kami



Badan Legislasi DPR RI menerima kunjungan DPRD Kota Sorong dan DPRD Kota Tegal

berkonsultasi dengan Baleg ini. Harapannya, aturan mengenai protokoler ini dapat di revisi, dan dilakukan perubahan,” jelas Edi.

Ia juga menyampaikan permintaan mengenai penguatan lembaga parlemen, dimana saat ini DPRD lemah dalam menyusun sebuah peraturan daerah. Ia mengaku, proses penyusunan peraturan daerah tidak didukung sarana dan prasarana yang memadai.

“Misalnya dari sisi staf ahli yang sangat terbatas, beda dengan DPR RI yang punya staf ahli, sementara di DPRD sangat minim, sehingga kami sulit mendapatkan masukan dari staf ahli. Untuk itu perlu diatur regulasi untuk menguatkan fungsi Badan Legislatif DPRD dalam menyusun peraturan daerah,” harap Edi.

Ke depannya, hasil dari pertemuan dengan Baleg ini, diharapkan dapat memberikan perubahan yang signifikan pada DPRD. Ia juga mengapresiasi Baleg DPR RI yang sudah mengakomodir dan mendukung masukan Anggota DPRD.

Hal yang sama diungkapkan oleh Ketua DPRD Kota Sorong Petronela Kambuaya. Ia menyatakan, hasil pertemuan, dan apa yang sudah disarankan oleh Baleg DPR RI akan dilaksanakan di daerah.

Hadir dalam kesempatan itu, Anggota Komisi II DPR sekaligus Anggota Baleg DPR Agung Widyantoro (F-PG), dan Deputi Bidang Perundang-undangan Sekretariat Jenderal DPR RI Johnson Rajagukguk. (sf)/foto:iwan armanias/parle/iw.

Pemerintah Kurang Antisipatif Terhadap Tanggul Tua

Wakil Ketua Komisi V DPR Yudi Widiana Adia menyalahkan kurangnya antisipatifnya pemerintah terhadap keberadaan tanggul tua. Sebab, akibat

jebolnya tanggul di Kabupaten Indramayu, ternyata sangat merugikan roda ekonomi nasional.

“Kami melihat ada kurang antisipa-

tifnya pemerintah terhadap tanggul-tanggul yang umumnya usia tua. Karena (jebolnya tanggul) persis di dekat jalur Pantura yang merupakan

jalur ekonomi dan logistik nasional,” kata Yudi kepada wartawan saat memimpin Tim Kunjungan Spesifik Komisi V DPR meninjau dampak dari jebolnya tanggul di Desa Pilangsari, Kabupaten Indramayu, Senin (23/3).

Seperti diketahui, banjir yang menerjang tujuh kecamatan di Kabupaten Indramayu disebabkan jebolnya sembilan tanggul, Senin (16/3) dini hari lalu. Tanggul-tanggul tersebut, yakni satu titik di Kecamatan Jatibarang, satu titik di Kecamatan Kertasemaya, tiga titik di Desa Bodas Kecamatan Tukdana, tiga titik di Desa Rancajawat Kecamatan Tukdana, dan satu titik di Desa Gadel Kecamatan Tukdana.

Yudi mengungkapkan, selain disebabkan tingginya curah hujan, jebolnya tanggul juga karena lemahnya peran pemerintah dalam melakukan pemeliharaan tanggul yang sudah memasuki usia tua. Alasannya, kejadian jebolnya tanggul bukan yang pertama kali di Indonesia. “Seperti halnya tanggul Pilangsari yang dibangun tahun 1971. Tentu kami sangat menyayangkannya,” ujarnya.

Untuk itu, Politisi PKS ini meminta agar pemerintah segera melakukan general check up tanggul-tanggul yang sudah tua, agar kejadian serupa tidak berulang kembali. “Untuk kasus Indra-



Tim Kunker Spesifik Komisi V DPR meninjau perbaikan salah satu tanggul yang jebol

mayu agar segera dituntaskan tanggul darurat dan kemudian disempurnakan menjadi tanggul yang berkekuatan jangka panjang,” katanya.

Dalam kunjungannya, Tim Kunjungan Spesifik Komisi V DPR meninjau beberapa tanggul yang jebol diantaranya adalah Tanggul Cimanuk Blok Cilengkol, Tanggul Cimanuk Jatibarang baru Blok Lapangan dan Tanggul Cimanuk Blok Toko Alba.

Dalam kunjungan spesifik itu, rom-

bongan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR Yudi Widiana Adia diikuti sejumlah anggota Komisi V DPR lainnya, diantaranya, Yoseph Umar Hadi (FPDIP), Moh. Nizar Zahro (F Gerindra), Anton Sukartono Suratno (FPD), Mohammad Toha (FPKB), Mahfudz Abdurrahman (FPKS), Nurhayati (F PPP), Syahrulan Pua Sawa (FPAN), Sahat Silaban (FNasdem) dan Miryam S Haryani (F Hanura). (nt) foto: nita/perle/hr

DPR Minta Pemda dan Pusat Bersinergi Tangani Banjir



Ketua Tim Kunjungan Spesifik Komisi V DPR RI Yudi Widiana Adia bersama rombongan meninjau sungai Cimanuk

DPR akan mendorong agar pemerintah pusat segera melakukan penanganan terhadap persoalan tanggul-tanggul tua. Sebab bila tak segera dibenahi, bukan tidak mungkin banjir akan melanda daerah di sekitar tanggul. Untuk itu pemerintah daerah diharapkan segera bersinergi dengan pemerintah untuk melaporkan lokasi yang dianggap rawan banjir serta mencatat dan merekap titik-titik tanggul yang kritis.

Demikian salah satu hasil yang didapat Tim Kunjungan Spesifik Komisi V DPR yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR Yudi Widiana Adia saat meninjau beberapa tanggul yang jebol akibat banjir di Kecamatan Jatibarang, Indramayu, Senin (23/3).

Seperti diketahui, banjir yang menerjang tujuh kecamatan di Kabupaten

Indramayu disebabkan jebolnya sembilan tanggul, Senin (16/3) dini hari lalu. Tanggul-tanggul tersebut, yakni satu titik di Kecamatan Jatibarang, satu titik di Kecamatan Kertasemaya, tiga titik di Desa Bodas Kecamatan Tukdana, tiga titik di Desa Rancajawat Kecamatan Tukdana, dan satu titik di Desa Gadel Kecamatan Tukdana.

Untuk menangani persoalan ini, sebagai pimpinan Komisi V DPR, pihaknya akan meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk melakukan pengecekan terhadap tanggul-tanggul. “Komisi V DPR meminta Dirjen SDA Menteri

Pupera yang juga mendampingi kunjungan agar melakukan *general chek up* tanggul-tanggul,” katanya.

Sementara itu Anggota Komisi V DPR Yoseph Umar Hadi (FPDIP) yang ikut dalam rombongan Tim Kunjungan Spesifik Komisi V DPR mengatakan anggaran perbaikan infrastruktur pertanian di Indramayu akan menjadi percuma, bila banjir terus terjadi. Tanaman padi petani akan rusak, bila terus diterjang banjir.

“Tahun 2015 sudah dianggarkan dan besarnya Rp500 miliar dan itu untuk keseluruhan. Untuk penanganan tanggul jebol di Indramayu ini, cukup

Rp4 miliar. Penanganan banjir harus diperhatikan,” ujar Yoseph Anggota DPR dari daerah pemilihan (dapil) setempat.

Dalam kunjungan spesifik itu, rombongan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR Yudi Widiana Adia diikuti sejumlah anggota Komisi V DPR lainnya, diantaranya, Yoseph Umar Hadi (FPDIP), Moh. Nizar Zahro (FGERindra), Anton Sukartono Suratto (FPD), Mohammad Toha (FPKB), Mahfudz Abdurrahman (FPKS), Nurhayati (FPPP), Syahrulan Pua Sawa (FPAN), Sahat Silaban (FNasdem) dan Miryam S Haryani (FHanura). (nt) foto: nita/parle/hr

Pelemahan Rupiah Berdampak Pada Pelaku Usaha

Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika merosot tajam. Bahkan, tembus hingga lebih dari Rp 13 ribu, yang merupakan pelemahan terendah sejak 1998. Anggota Komisi VI Darmadi Durianto menilai, pelemahan rupiah ini disebabkan oleh banyak faktor. Utamanya, lebih kepada faktor eksternal.

“Pelemahan rupiah ini diakibatkan beberapa faktor, tapi lebih karena adanya faktor eksternal. Faktor eksternal yang paling mempengaruhi adalah tingginya harapan pasar keuangan dan pelaku keuangan terhadap ekonomi Amerika yang sedang bagus,” kata Darmadi, saat kunjungan kerja di Sulawesi Utara, baru-baru ini

Politisi PDI Perjuangan ini menyatakan, akibat permintaan dolar Amerika yang cukup tinggi, menyebabkan penguatan dolar terhadap mata uang lain, termasuk rupiah Indonesia. Tentunya, pelemahan ini berimbas kepada perbankan maupun ekonomi di Indonesia.

“Akibatnya jelas ke perbankan, akan banyak timbul kredit macet, sehingga angka non-performing loan (NPL) akan naik dan rasio kecukupan bank itu akan turun nantinya. Untuk itu, level ini perlu dicek oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui uji krisis (uji stress). OJK mengatakan, akan bermasalah kalau kurs mencapai Rp 15.000. Kita harus siap-siap masuk dalam fase krisis,” imbuh Darmadi.

Dalam kesempatan pertemuan dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia di Manado, OJK, Permodalan Nasional Madani, Bank BUMN dan BUMD, serta Perusahaan Penjaminan, Darmadi sempat mempertanyakan apakah Sulut sudah melakukan uji krisis, sehingga bisa melakukan antisipasi pelemahan rupiah terhadap dolar, dan imbasnya kepada ekonomi Sulut.

Politisi asal Dapil DKI Jakarta III ini menjelaskan, dampak paling parah bisa dialami para pelaku usaha berbahan baku



Anggota Komisi VI DPR Darmadi Durianto

impor. Pasalnya, jika menggunakan bahan baku impor, yang pembeliannya menggunakan mata uang dolar, akan semakin berat. Dilemanya, para pelaku usaha tersebut tidak semena-mena dapat menaikkan harga jualnya.

“Jika bahan baku yang dia impor dari luar itukan pukulan, kenaikan harganya cukup signifikan. Sementara, ketika dia jual barangnya di dalam negeri kan tidak bisa menaikkan harga karena turunnya pendapatan masyarakat. Ini jelas akan menurunkan omset pelaku usaha, margin akan menurun sehingga mereka bisa saja tidak meng-cover biaya produksi,” tukas Darmadi.

Darmadi menyarankan, untuk mengantisipasi rupiah semakin melemah, mau tidak mau pemerintah harus menggenjot ekspor. Kemudian, Pemerintah harus memberikan keringanan atau fasilitas ekspor yang besar kepada pelaku-pelaku usaha sehingga bisa dengan mudah mengekspor. Termasuk fasilitas lainnya agar ekspor lebih besar sehingga defisit transaksi neraca berjalan bisa turun.

“Supaya defisit transaksi berjalan itu tidak terjadi, bank harus berikan fasilitas kepada eksportir, agar ekspor digenjot terus. Jadi sehingga semua produk dalam negeri bisa didistribusikan keluar negeri,” saran Darmadi. (sf/

foto:sofyan/parle/iw.

DPR Gelar Workshop Ekonomi dan Sosial



Suasana Workshop Kebijakan Makro Ekonomi, Moneter, dan Perbankan

Untuk memberi pemahaman yang komprehensif tentang isu-isu perekonomian dan sosial, DPR menggelar serangkaian workshop bertema ekonomi dan masalah-masalah sosial kontemporer bagi para anggota DPR

RI. Workshop berlangsung selama empat kali di DPR.

Workshop yang diadakan Sekretariat Jenderal DPR RI ini, mengambil tajuk “Kebijakan Ekonomi dan Sektor Strategis Nasional Tahun 2015”. Acara

ini dibuka oleh Ketua DPR Setya Novanto sekaligus memulai sesi pertama dengan sub tema “Kebijakan Makro Ekonomi, Moneter, dan Perbankan” pada Rabu, 25 Maret 2015. Sesi pertama menghadirkan narasumber Ahmad Erani Yustika, Yanuar Rizky, dan A. Prasetyantoko. Sesi tersebut dihadiri para anggota Komisi VII, XI, dan Badan Anggaran.

Sesi kedua berlangsung pada Rabu, 1 April 2015 dengan tema “Kebijakan Fiskal dan Kesejahteraan Sosial” dengan menghadirkan pembicara Revisond Baswir, Hendri Saporini, dan Edi Prio Pambudi. Tema ini akan membicarakan kebijakan fiskal, perlindungan sosial, hingga reformasi struktural dan pembiayaan. Pada sesi ini akan dihadiri para anggota Komisi VIII, Komisi IX, dan Komisi XI.

Sesi ketiga digelar Rabu, 8 April 2015 dengan tema “Kebijakan Sektor Pertanian, Maritim, dan Perdagangan Internasional.” Hadir sebagai pembicara Dwi Andreas Santosa, Arif Satria, dan Mohammad Faisal. Acara akan dihadiri anggota Komisi IV, V, VI. Sementara sesi terakhir pada Senin, 13 April 2015 dengan tema “Kebijakan Sektor Industri, Energi, dan Ketenagakerjaan”. Hadir sebagai pembicara Ina Primiana, Ichsanuddin Noorsy, Hendri Saporini. Acara dihadiri para anggota Komisi VI, Komisi VII, dan Komisi IX. (mh)/foto:andri/parle/iw.

Seminar Commemorates International Women’s Day 2015

Sebelumnya perempuan dipandang sebagai kaum kedua, setelah laki-laki. Namun sebenarnya, perempuan merupakan sosok yang tidak kalah dengan pria, pemikiran wanita jauh kedepan, sangat inspiratif dan mengedukasi. Hal tersebut diungkapkan Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Nurhayati Ali Assegaf dalam seminar bertajuk *Commemorates International Women’s Day 2015*, di Jakarta, Selasa (24/3).

“Emansipasi wanita sejatinya merupakan inti dari demokrasi itu sendiri. Demokrasi politik menjadi sebuah kesempatan bagi perempuan untuk menyampaikan gagasan dan ide di tingkat nasional. Demokrasi juga menjadi



Suasana seminar bertajuk *Commemorates International Women’s Day 2015*

peluang bagi perempuan untuk dapat terjun langsung berkiprah dalam bidang sosial ekonomu dan kegiatan politik yang mana selama ini didominasi oleh kaum pria,” ujar Nurhayati menambahkan.

Dalam acara yang sejatinya menjadi salah satu agenda dalam rangkaian peringatan hari perempuan dunia 2015 ini, Nurhayati menjelaskan bahwasanya di Indonesia sendiri kesamaan hak antara perempuan dan laki-laki diberbagai bidang kehidupan itu telah diatur dan dijamin dalam Undang-undang Dasar 1945.

“Dalam bidang politik, undang-undang telah mengatur kuota perempuan dalam legislatif yakni sebesar 30 persen dari keseluruhan jumlah anggota dewan yang ada. Sayangnya jumlah tersebut pun belum bisa dipenuhi oleh perempuan Indonesia,” papar Politisi dari Dapil Jawa Timur V ini.

Hal itu terlihat dari penurunan jumlah kesertaan perempuan di DPR yakni sebesar 18,39 persen di tahun 2009 menjadi 17,32 persen di tahun 2014. Kesertaan perempuan untuk DPD juga menurun dari tahun 2009 sebesar 28 persen menjadi 26,51 persen

pada tahun 2014. Sementara DPRD tidak berbeda jauh dengan DPR dan DPD, kesertaan perempuan di tingkat provinsi ini menurun dari 16,14 persen menjadi 14 persen.

“Disinilah diperlukan peran yang lebih dari perempuan, untuk mewakili bahkan membantu kaum perempuan lainnya secara umum. Oleh karena itu kami berharap perempuan dapat terus maju dan memperjuangkan segala hak kaum hawa,” tegas Politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini. (Ayu) foto: andri/parle/hr

Perlu Ada Pemisahan Secara Jelas Antara Tugas OJK dan BI

Deputi Komisioner Manajemen Strategis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Lucky F. A. Hadibrata menyatakan ke depan perlu ada pemisahan secara jelas antara tugas OJK dan tugas Bank Indonesia (BI).

Hal tersebut disampaikan Lucky saat memberikan masukan terkait Revisi Undang-Undang Perbankan saat pertemuan Tim Panitia Kerja (Panja) Perbankan Komisi XI DPR RI dipimpin Gus Irawan Pasaribu dengan OJK, BI dan jajaran perbankan di Surabaya, Jawa Timur beberapa waktu lalu.

“Ada hal-hal yang perlu diluruskan, pertama, terkait peran BI dan peran OJK kedepan. Dirasakan pada saat ini apabila kita memperhatikan tugas OJK, kita mengawasi secara individu bank melalui pengawasan, pengaturan dan juga bagaimana konsisten menjadi sehat,” kata Lucky.

“Disisi lain, BI itu dari sisi makro menunjukkan harus membuat satu fondasi infrastruktur misalnya jalan tol, jalan nasional, jalan negara, jalan kabupaten, jalan kota. Infrastruktur yang memperhatikan jadi efisiensi nasional. Itu adalah tugas dari sisi makro,” tambah Lucky.

Dengan kata lain Infrastruktur adalah tugas BI, sedangkan untuk individu-individu bank atau lembaga jasa keuangan secara keseluruhan adalah tugas OJK.

Menurut Lucky, revisi UU Perbankan yang sudah disusun Komisi XI periode DPR yang lalu, sebetulnya sudah banyak menghasilkan hal-hal yang positif.



Pertemuan Tim Kunjungan Kerja Panja Perbankan Komisi XI DPR RI dipimpin Wakil Ketua Gus Irawan Pasaribu dengan Kepala Perwakilan BI Jawa Timur, Kepala Regional 3 OJK, dan jajaran perbankan Jawa Timur di Surabaya

Lucky menegaskan, digital menjadi penting dalam pelaksanaan tugas ke depan. Perbankan perlu diselaraskan dengan era digital, karena dirinya memandang perbankan sebagai sub sistem.

Dijelaskan Lucky bahwa sekarang di OJK tidak hanya memperhatikan bank-bank saja, tapi juga pasar modal, lembaga keuangan non bank seperti asuransi. Tiga sasaran utama ini akan menjaga stabilitas sistem keuangan.

“Jika dikatakan stabilitas sistem keuangan itu bukan hanya bank, tapi juga ada pasar modal, emiten, manajemen investasi, sampai juga ada industri keuangan non bank. Ini penting untuk bagaimana stabilitas sistem keuangan sebagai landasan pembangunan

yang berkelanjutan ke depan,” terang Lucky.

Selanjutnya Lucky juga menjelaskan tentang kemandirian finansial bagi masyarakat dalam mendukung upaya pemerataan pembangunan. Menurutnya ini penting dan ia percaya keberpihakan kepada rakyat itu begitu besarnya dan pembangunan itu tidak hanya fisik saja, tapi juga dari sisi mental dan dari sisi pemerataannya.

“Oleh karena itu peran jasa keuangan perlu didukung oleh percepatan bukan hanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi tapi juga bagaimana dirasakan dalam rangka kesejahteraan rakyat yang merata,” tandasnya. (sc) foto: suciati/parle/hr

DPR Dukung Pembangunan KEK Bitung

Komisi VI DPR mendukung rencana pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung, Sulawesi Utara. Walaupun pembangunan KEK ini merupakan domain dari Kementerian Koordinator Perekonomian, Komisi VI tetap mendukung. Mengingat, KEK Bitung ini memiliki potensi yang sangat bagus.

“Potensi Kawasan Ekonomi Khusus Bitung itu bagus untuk wilayah Indonesia Timur. Apalagi, pembangunan KEK ini juga bagian dari program Pemerintah,” kata Wakil Ketua Azam Azman Natawijana, usai melakukan peninjauan rencana pembangunan KEK Bitung, Sulawesi Utara, baru-baru ini. Peninjauan lapangan ini, Tim Kunjungan Kerja Komisi VI didampingi Wakil Walikota Bitung.

Politisi Demokrat ini menambahkan, saat ini yang terpenting adalah Pemerintah secepatnya menyelesaikan permasalahan pembebasan lahan dan melanjutkan pembangunan program tol Bitung-Manado. Azam menilai, jika kedua rencana itu sudah diselesaikan, diharapkan investor dapat merangkok masuk.

“Jadi, KEK itu bisa dari swasta atau Pemerintah. Bisa juga gabungan antara swasta, investor dan Pemerintah. Sebaiknya segera direalisasikan, sebab



Tim Kunker Komisi VI DPR mendengarkan penjelasan dari Wakil Walikota Bitung

KEK Bitung itu termasuk salah satu KEK yang sudah dicanangkan oleh pemerintah untuk program lima tahun ini,” harap Azam.

Dalam kesempatan itu, Wakil Walikota Bitung Max Lomban menjelaskan, kesiapan Pemerintah Kota Bitung terkait pembangunan KEK Bitung. Direncanakan, KEK Bitung akan mencakup lahan seluas 534 hektar. Sementara untuk memenuhi kebutuhan listrik, masih terus dikoordinasikan dengan Pemprov Sulawesi Utara.

“Pemkot Bitung terus berkoordi-

nasi dengan Pemprov Sulut, yang akan menjalin kerja sama dengan pengusaha dan investor dari China, yang rencananya akan membangun pembangkit listrik tenaga uap yang menghasilkan daya yang cukup besar, untuk memenuhi kebutuhan listrik di area KEK,” jelas Lomban.

Usai mendapat penjelasan mengenai rencana pembangunan KEK, Tim Kunker Komisi VI melanjutkan peninjauan lapangan ke Pelabuhan Bitung. (sf)/foto:sofyan/parle/iw.

Kemensos Harus Aktif Tekan Penyebaran ISIS

Ketua Komisi VIII DPR RI Saleh Partaonan Daulay berharap agar Kementerian Sosial (Kemensos) berpartisipasi aktif dalam menekan gerakan radikalisme *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) di Indonesia. Hal tersebut diungkapkannya di gedung Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (23/3).

Saleh menjelaskan, sejatinya banyak program Kemensos yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dari berbagai lapisan, termasuk masyarakat miskin. Kemensos diungkapkannya juga memiliki jaringan struktur yang baik hingga ke tingkat kecamatan dan desa, seperti karangtaruna dan tagana. Kesemua itu seyogyanya dapat dijadikan sarana untuk menangkal



Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay

berkembangnya gerakan ISIS.

“Banyak pandangan yang menyatakan salah satu faktor munculnya gerakan radikalisme, terorisme, dan ISIS adalah persoalan ekonomi. Di sinilah Kementerian Sosial memainkan peran penting melalui program-program pemberdayaan dan perlindungan sosialnya,” kata Saleh.

Untuk mendukung program Kemensos, Komisi VIII sudah mengalokasikan tambahan anggaran bagi program pemberdayaan dan perlindungan sosial melalui APBN-P yang lalu. Dari alokasi anggaran Rp8,1 Triliun pada tahun 2014 meningkat menjadi sebesar Rp22,4 Triliun.

“Anggaran yang tidak sedikit itu

tentu sangat bermanfaat jika betul-betul dapat diarahkan bagi pembinaan masyarakat miskin yang berpotensi direkrut oleh kelompok-kelompok garis keras,” ujar Politisi asal Dapil Sumut II ini.

Jadi, ditambahkan Politisi dari Fraksi PAN ini, penanganan radikalisme, terorisme dan ISIS ini tidak hanya di-

serahkan dan menjadi tanggung jawab instansi tertentu seperti Kepolisian, BNPT, dan Kementerian Agama saja, melainkan juga harus dikerjakan secara bersama-sama dan terpadu.

Sebagaimana diketahui, sejauh ini Kemensos memiliki program-program unggulan yang langsung menyentuh masyarakat miskin, antara lain

Program Keluarga Harapan (PKH) di perkotaan dan pedesaan, Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Karang Taruna Usaha Ekonomi Produktif (UEP), dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). (Ayu)/foto:iwan armanias/parle/iw.

Belum Ada Langkah Konkret PLN Atasi Kekurangan Listrik



Anggota Komisi VI DPR Slamet Junaedi

Anggota Komisi VI DPR Slamet Junaedi menilai belum ada langkah konkret Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk memenuhi kekurangan asupan listrik yang masih defisit di wilayah Sulawesi Utara. Demikian disampaikan usai pertemuan dengan PT PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo, di Manado, Sulut, belum lama ini.

“Kita sudah mendengarkan aspirasi masyarakat bahwa di Sulut ini sangat kekurangan asupan listrik, artinya defisit listrik. Hanya saja yang saya sayangkan itu langkah-langkah konkret PLN itu sendiri tidak pernah ada. Mereka tidak pernah melakukan alternatif ketika mereka kekurangan sumber listrik,” sesal Jun, panggilan akrab Slamet Junaedi.

Politisi Fraksi Nasdem ini menyayangkan, jika PLN menggunakan bahan bakar minyak untuk menggerakkan pembangkit listrik, maka selama itu pula PLN akan mengalami defisit. Dalam tahun 2014, pembelian bahan bakar mencapai Rp 2,5 triliun lebih, sedangkan untuk sewa mesin sebesar Rp 179 miliar pada 2014.

“Kalau saran saya lebih baik beli mesinnya, daripada sewa. Kemudian saya lihat di sini anginnya cukup kencang, apa tidak sebaiknya kita memakai kincir angin seperti di Belanda, untuk menutupi kekurangan-kekurangan suplai tadi,” saran Politisi asal Dapil Jawa Timur XI ini.

Hal senada diungkapkan oleh Anggota Komisi VI DPR Mohammad Suryo Alam (F-PG). Ia menilai PLN harus melakukan banyak inovasi untuk memenuhi kebutuhan listrik, terutama untuk daerah kepulauan seperti di Sulut.

“PLN perlu ada upaya-upaya untuk mencari sumber-sumber listrik yang sesuai alamnya, misalnya solar cell atau apa. Kalau BBM itu sekarang kita sudah keberatan karena harga minyak yang tinggi,” saran Politisi asal Dapil Jawa Timur VIII ini.

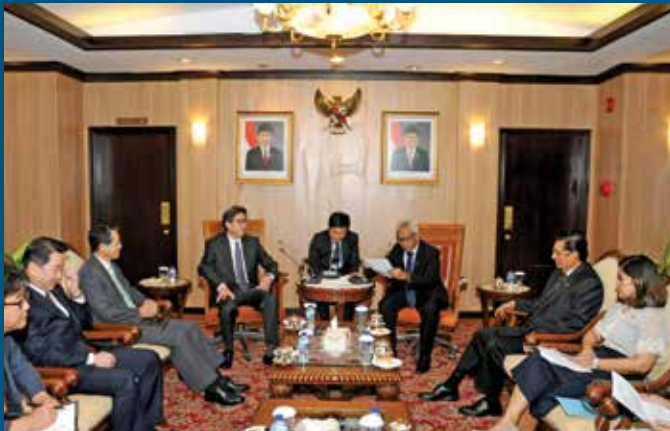
Sebelumnya, para Direksi PLN Wilayah Suluttenggo memaparkan, per-

masalahan dan kendala utama yang dihadapi oleh PLN di Sulawesi Utara khususnya dalam pengembangan bisnis kelistrikan dikarenakan adanya keterbatasan daya pembangkit listrik dan pemakaian bahan bakar minyak masih tinggi.



Anggota Komisi VI DPR Mohammad Suryo Alam

Langkah strategis yang diambil untuk mengatasi kendala jangka pendek itu dengan menambah pembangkit sewa untuk mengatasi kekurangan daya, dan untuk jangka panjangnya dengan membangun pembangkit dan jaringan transmisi baru, serta membangun pembangkit energi baru terbarukan. (sf) foto:sofyan/parle/hr



Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Agus Hermanto didampingi Ketua Komisi XI Fadel Muhammad dan Wakil Ketua BKSAP Meutya Hafidz menerima kunjungan kehormatan Sekjen National Assembly Republik Korea Mr. Park Hyung-jun, Kamis (26/03) Foto: Iwan Armanias/Parle/HR



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon courtesy call dengan Direktur Taipei Economic and Trade Office (TETO) Benyamin Hong, Selasa (24/03). Foto: Iwan Armanias/Parle/HR



Pertemuan Tim Kunjungan Kerja Panja Perbankan Komisi XI DPR RI dipimpin Wakil Ketua Gus Irawan Pasaribu dengan Kepala Perwakilan BI Jawa Timur, Kepala Regional 3 OJK, dan jajaran Perbankan Jawa Timur di Surabaya, Kamis (19/03) Foto: Suciati/Parle/HR



Anggota Komisi IX DPR RI berdialog dengan dokter dan pasien Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta mengenai pelaksanaan BPJS Kesehatan, Kamis (26/03) Foto: Naefudji/Parle/HR

